

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI

NOMOR: Kd.22.05/3/PP.00/SKI 28/2 /2013

### TENTANG

## PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BUNGKU UTARA DESA BATURUBE KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI

Membaca

Surat Kepala Madrasah Nomor : MTs.16/22.06/PP.01.1/11/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs Negeri Bungku Utara

Menimbang

- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang pertu memberikan persetujuan pemeberian izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instasi Vertikal Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BUNGKU UTARA DESA BATURUBE KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI.

Pertama

Meberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bungku Utara Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bungku Utara tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.